

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Kesimpulan

##### 4.1.1. Interdependensi Aktor dalam Proses Produksi Komoditas Cabai di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis penelitian melalui dimensi *actors, interdependency, and frames* dalam perspektif teori *network governance* yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa interdependensi aktor dalam proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi terbentuk sebagai konsekuensi dari perbedaan peran, kewenangan, serta kepemilikan sumber daya di antara para aktor yang terlibat. Namun demikian, kualitas hubungan ketergantungan tersebut belum sepenuhnya seimbang. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan kerangka regulasi yang mampu menyatukan cara pandang aktor dalam memahami permasalahan produksi, serta belum adanya pembagian tugas dan wewenang yang terintegrasi.

- a) *Actors* dalam fenomena interdependensi aktor pada proses produksi komoditas cabai di kecamatan kumpeh telah mengidentifikasi aktor yang terlibat serta sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan produksi, meliputi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi sebagai pemangku kebijakan di daerah, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kumpeh sebagai fasilitator petani dengan DTPH sekaligus mendampingi proses produksi petani, Pemerintah Desa ssebagai fasilitator

dengan aktor lain, Petani baik sebagai individu, Kelompok Tani, atau Gabungan Kelompok Tani selaku pelaku utama proses produksi, Bank Indonesia sebagai aktor pendukung yang memiliki sumber daya sarana prasarana pertanian, dan Tengkulak Lokal sebagai aktor yang memiliki akses pasar dan jaringan distribusi pascapanen.

- b) *Interdependency* dalam fenomena penelitian ini menemukan bahwa kualitas *interdependency* petani dengan Bank Indonesia cenderung lebih fungsional dan responsif karena didukung fleksibilitas sumber daya dan mekanisme komunikasi yang lebih adaptif. Sebaliknya, kualitas hubungan petani dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dinilai kurang responsif sehingga ketergantungan yang terbentuk bersifat administratif dan tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan teknis petani. Relasi dengan tengkulak hanya melibatkan sebagian kecil petani dan tidak menjadi pola dominan dalam dua desa sentra cabai di Kecamatan Kumpeh. Sementara itu, pemerintah desa dan Balai Penyuluh Pertanian berperan sebagai fasilitator yang menjembatani interaksi, namun tidak menjadi aktor utama yang menentukan arah ketergantungan.
- c) *Frames* dalam fenomena penelitian ini menunjukkan adanya keselarasan yang semu, karena meskipun para aktor dipertemukan oleh objek persoalan yang sama seperti pupuk dan banjir serta memiliki tujuan bersama berupa stabilitas harga, kerangka pikir mereka tetap terfragmentasi akibat perbedaan kepentingan institusional dan batas kewenangan, sehingga interdependensi tidak berkembang secara organik melainkan berjalan parsial sesuai prioritas masing-masing aktor dan kerap menghambat sinkronisasi aksi di lapangan.

#### **4.1.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Jalannya Interdependensi Aktor dalam Pelaksanaan Proses Produksi Komoditas Cabai di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi**

Hubungan ketergantungan antaraktor dalam proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh telah terbentuk sebagai konsekuensi dari perbedaan sumber daya, kewenangan, dan kepentingan masing-masing aktor. Namun, kualitas interdependensi yang terbangun menunjukkan dinamika yang belum sepenuhnya stabil dan setara.

Penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor pendukung interdependensi aktor dalam pelaksanaan produksi cabai, yaitu: (1) kesadaran atas ketergantungan antaraktor, yang menjadi fondasi utama terbentuknya relasi; (2) gaya kepemimpinan inisiatif pemerintah desa yang proaktif dalam menjembatani kebutuhan petani dengan aktor eksternal; serta (3) responsivitas dan fleksibilitas aktor eksternal, khususnya dalam mendukung kebutuhan produksi secara adaptif. Ketiga faktor tersebut berkontribusi dalam menjaga hubungan saling bergantung tetap berjalan meskipun berada dalam struktur kewenangan yang berbeda.

Meskipun demikian, interdependensi yang terbentuk belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan ketergantungan antaraktor masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kontekstual. Penelitian ini mengidentifikasi lima faktor penghambat interdependensi aktor dalam proses produksi cabai, yaitu: (1) komunikasi yang tidak efektif; (2) ketidakjelasan kelembagaan; (3) kurang kuatnya komitmen aktor kunci; (4) keterbatasan kapasitas

penyuluh; dan (5) faktor ekologis berupa banjir tahunan. Keberadaan faktor-faktor tersebut menyebabkan interdependensi cenderung bersifat parsial dan belum berkembang menjadi relasi yang terintegrasi dan responsif secara menyeluruh.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan yang menunjukkan interdependensi aktor dalam proses produksi komoditas cabai di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam hubungan. Oleh karena itu, peneliti merumuskan beberapa rekomendasi guna memperkuat hubungan ketergantungan agar lebih terstruktur, adaptif, dan berkelanjutan, sebagai berikut:

1. Relasi antaraktor saat ini masih bertumpu pada regulasi sektoral yang parsial dari masing-masing lembaga. Diperlukan penyusunan mekanisme formal, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), nota kesepahaman (MoU), atau regulasi kolaboratif yang secara eksplisit mengatur pembagian peran dan mekanisme koordinasi antaraktor dalam produksi cabai. Dalam hal ini, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) perlu mengambil peran sebagai inisiator kolaborasi mengingat posisinya sebagai pemangku kebijakan teknis di sektor pertanian.
2. Komunikasi antaraktor perlu diperkuat melalui forum koordinasi yang lebih terstruktur dan berkala, sehingga tidak hanya bersifat situasional. Dialog rutin antar pemerintah daerah, penyuluh, pemerintah desa, Bank Indonesia, dan perwakilan petani penting untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi persoalan produksi, seperti distribusi pupuk dan banjir, serta meminimalkan miskomunikasi dalam implementasi program.

3. Penguatan kapasitas penyuluh perlu dilakukan baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Penambahan jumlah penyuluh dan peningkatan kompetensi teknis, khususnya dalam komoditas cabai, akan memperkuat fungsi pendampingan dan memperdalam kualitas interdependensi antara pemerintah dan petani.
4. Mengingat banjir merupakan persoalan tahunan yang sulit dihindari, diperlukan kajian teknis yang lebih komprehensif dan komitmen bersama antaraktor untuk menyusun strategi adaptasi jangka panjang. DTPH bersama penyuluh dan pemerintah desa perlu membangun komunikasi yang realistis dengan petani terkait opsi mitigasi yang dapat dilakukan, sehingga tidak menimbulkan ekspektasi yang tidak terpenuhi.
5. Perlu adanya standarisasi peran pemerintah desa dalam sektor pertanian melalui Peraturan Desa (Perdes) atau integrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. Hal ini penting agar dukungan terhadap sektor cabai tidak hanya bergantung pada inisiatif personal kepala desa, melainkan menjadi kebijakan desa yang berkelanjutan.
6. Petani perlu didorong untuk memperkuat kelembagaan kelompok tani sebagai ruang belajar dan koordinasi kolektif, bukan semata sebagai wadah administratif untuk mengakses bantuan. Peningkatan kapasitas manajerial, pencatatan produksi, serta perencanaan usaha tani akan memperkuat posisi tawar petani dalam hubungan interdependensi dan mengurangi ketergantungan yang bersifat pasif terhadap aktor yang memiliki sumber daya lebih besar.